

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI PERGURUAN TINGGI

Muhammad Aryo Ramadhan¹, Rini Setyaningsih^{2*}, Irawati³

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3}

^{2*}rinisetyaningsih28@gmail.com

Corresponding Author: Rini Setyaningsih

How to cite this article: Ramadhan, M. A., Setyaningsih, R., & Irawati. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kependidikan Islam*. 15, no. 1. (February, 28, 2025): 23-33.
<https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/JKPI/article/view/4492>.

Abstract

This study examines the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) in higher education, focusing on its role in improving education quality, identifying disparities in implementation, and formulating strategic steps to optimize its application. Using a systematic literature review method, secondary data were obtained from 15 journal articles published between 2018 and 2024, sourced from reputable databases such as Google Scholar, DOAJ, and Sinta. The findings reveal that SPMI implementation in Indonesian higher education institutions faces significant challenges, including resource limitations, lack of commitment to quality, inadequate technological support, and unequal policy distribution. These challenges contribute to disparities in education quality, affecting graduate competencies, accreditation status, and institutional competitiveness at the global level. To address these issues, this study proposes strategic measures such as strengthening institutional resources, integrating information technology, fostering a quality-oriented culture, enhancing policy support, and adopting holistic evaluation approaches like the Balanced Scorecard. By implementing these strategies, higher education institutions can reduce disparities, optimize SPMI application, and establish a more equitable, sustainable, and globally competitive education system.

Keyword: implementation, SPMI, improvement, quality, higher education.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, identifikasi disparitas dalam pelaksanaannya, serta perumusan strategi optimal untuk mengatasi hambatan yang ada. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis 15 artikel jurnal yang dipublikasikan pada rentang tahun 2018–2024 dari sumber bereputasi seperti Google Scholar, DOAJ, dan Sinta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI di perguruan tinggi Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen terhadap mutu, kurangnya dukungan teknologi, serta distribusi kebijakan yang tidak merata. Tantangan ini menyebabkan disparitas mutu pendidikan yang berdampak pada kompetensi lulusan, capaian akreditasi, dan daya saing institusi di tingkat global. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan langkah strategis seperti penguatan sumber daya institusi, integrasi teknologi informasi, pengembangan budaya mutu, peningkatan dukungan kebijakan, serta penerapan pendekatan evaluasi holistik seperti Balanced Scorecard. Dengan strategi ini, perguruan tinggi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu, mengoptimalkan implementasi SPMI, serta mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih merata, berkelanjutan, dan kompetitif secara global.

Kata Kunci: implementasi, SPMI, peningkatan, mutu, perguruan tinggi.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan perannya, pendidikan tinggi tetap mengedepankan nilai-nilai humaniora dan pemberdayaan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Pendidikan tinggi juga berfungsi meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global di berbagai bidang.¹ Pendidikan tinggi diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus melahirkan individu yang berintelektual, kreatif, dan profesional, yang menjunjung nilai-nilai budaya, toleransi, demokrasi, karakter tangguh, serta keberanian membela kebenaran demi kepentingan bangsa.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi terhadap standar ini dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikelola oleh perguruan tinggi secara mandiri, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui proses akreditasi oleh lembaga independen. Dalam era globalisasi, peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda prioritas guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Perguruan tinggi dihadapkan pada tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, penerapan SPMI menjadi instrumen strategis untuk memastikan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan selaras dengan standar evaluasi nasional. Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi salah satu agenda prioritas dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di era globalisasi. Perguruan tinggi dihadapkan pada tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta memiliki kemampuan adaptasi terhadap dinamika perubahan. Dalam konteks ini, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi instrumen strategis untuk memastikan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan.²

Seluruh perguruan tinggi diwajibkan memiliki akreditasi sebagai salah satu indikator kualitas institusi. Untuk memenuhi syarat tersebut, perguruan tinggi perlu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu (SPM) perguruan tinggi, selain Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah serangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengontrol dan meningkatkan mutu pengelolaan secara terencana dan berkelanjutan. Sebaliknya, SPME merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga independen guna menilai kelayakan dan tingkat pencapaian mutu institusi atau program studi, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk peringkat akreditasi.³

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara berkesinambungan.⁴ Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal seperti mahasiswa, dosen, staf, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, dan pemerintah mendapatkan kepuasan atas kinerja dan hasil yang dihasilkan perguruan tinggi. Penjaminan mutu juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat(1) sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di tingkat institusi. Kedua, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yang melibatkan proses akreditasi oleh lembaga independen untuk menilai

¹ Afridoni et al., "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13832–13838.

² Tetty Marlina Tarigan and Fatimah Zahara, "Internal Quality Assurance System in Achieving Accreditation Scores for Islamic Religious Higher Education," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 8, no. 2 (2024): 677.

³ Winarso Widy, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta," *Dimensi* 10, no. November (2021): 665–673, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms%0AIMPLEMENTASI>.

⁴ Tarigan and Zahara, "Internal Quality Assurance System in Achieving Accreditation Scores for Islamic Religious Higher Education."

kesesuaian dan pencapaian standar mutu perguruan tinggi. Ketiga, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI), yang berfungsi sebagai basis data nasional untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan mutu pendidikan tinggi secara transparan dan terintegrasi. Ketiga sistem ini dirancang untuk saling melengkapi dalam memastikan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁵

SPMI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016, menekankan siklus berkelanjutan yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Pasal 5 Ayat (1) dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menerapkan SPMI guna menjamin mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam praktiknya, terdapat disparitas signifikan dalam pelaksanaan SPMI di berbagai perguruan tinggi, baik dari sisi kapasitas sumber daya, komitmen institusi, maupun infrastruktur pendukung. Disparitas ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran, ketersediaan tenaga pendidik berkualitas, serta akses terhadap teknologi dan kebijakan pendukung. Perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan, yang berdampak pada pencapaian akreditasi dan daya saing lulusan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas dalam implementasi SPMI serta merumuskan strategi yang dapat mengoptimalkan penerapannya agar perguruan tinggi di berbagai kondisi dapat mencapai standar mutu yang setara. Perguruan tinggi negeri dengan sumber daya lebih besar cenderung lebih unggul dibandingkan perguruan tinggi swasta atau institusi di wilayah terpencil.⁶

Tantangan lainnya mencakup rendahnya budaya mutu (*quality culture*), lemahnya kepemimpinan transformasional, serta keterbatasan integrasi teknologi dalam implementasi SPMI. Rendahnya budaya mutu di perguruan tinggi Indonesia merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya budaya mutu ini meliputi kurangnya kesadaran manajemen dan civitas akademika terhadap pentingnya mutu, lemahnya implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta minimnya komitmen dan dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan keberlanjutan peningkatan mutu. Padahal, budaya mutu dan kepemimpinan yang efektif telah terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan implementasi SPMI dan pencapaian standar pendidikan yang optimal.⁷

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan SPMI di perguruan tinggi. Urgensi penerapan SPMI semakin meningkat di era globalisasi, di mana perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat tetapi juga mampu bersaing dalam pasar kerja internasional, pada skala internasional standar pendidikan yang sering menjadi acuan standar pendidikan seperti standar ISO 21001:2018 yang lebih spesifik terhadap pelaksanaan pendidikan.⁸ Tanpa sistem penjaminan mutu yang efektif, institusi pendidikan tinggi akan mengalami kesulitan dalam memenuhi standar nasional dan internasional, yang berdampak pada akreditasi, reputasi, serta daya saing lulusan. Selain itu, kebijakan nasional seperti SN-Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa SPMI merupakan bagian integral dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi SPMI serta merumuskan strategi yang dapat membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas akademik dan manajerialnya secara optimal. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis, penerapan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi proses, serta pengintegrasian

⁵ Ahmad Sulaiman and Udik Budi Wibowo, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 17.

⁶ Muhammad Syahril Harahap et al., "Kajian Implementasi Spmi (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah Dan Perguruan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2023): 447–480.

⁷ Asep Saepudin, "Problematika Dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Teknodik* (2004): 068–086.

⁸ Febriana Kurnia Dewi, Nur Kholis, and Enni Subchandini, "Implementasi Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester Sebagai Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya," *TADBIR MUWAHHID* 7, no. 1 (April 30, 2023): 133–150.

budaya mutu ke dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Fokus utama adalah pada strategi yang berorientasi pada hasil nyata dan berkelanjutan, guna mendukung tercapainya visi perguruan tinggi sebagai institusi unggul yang relevan secara global.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah implementasi SPMI di perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan, untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi, untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penerapan SPMI di perguruan tinggi.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur sistematis untuk menganalisis implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel jurnal yang relevan dari beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan Publish or Perish. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti *"Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi"*, *"Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi"*, dan *"Strategi Peningkatan Mutu Akademik"*.

Artikel yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya. Hanya artikel yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi dan terindeks dalam basis data ilmiah yang digunakan dalam analisis ini. Selain itu, hanya artikel yang membahas implementasi SPMI di perguruan tinggi dalam rentang waktu 2018–2024 yang dianalisis untuk menjaga relevansi penelitian. Artikel yang berfokus pada sistem penjaminan mutu di tingkat sekolah dasar dan menengah, serta yang tidak memiliki kajian empiris atau diskusi mendalam terkait SPMI, dikecualikan dari penelitian ini.

Dari hasil seleksi, diperoleh 15 artikel yang dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tren utama, tantangan, serta rekomendasi dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis dokumentasi, di mana data dari artikel yang terkumpul dikaji untuk menemukan pola, kesenjangan, dan strategi yang dapat diterapkan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Temuan dari studi literatur ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi yang lebih efektif dalam penerapan SPMI di perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Pada Peningkatan Mutu Pendidikan

Budaya mutu di perguruan tinggi merupakan elemen penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Penerapan budaya mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.⁹ Meskipun keberadaan sistem penjaminan mutu internal telah diakui sebagai komponen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, dalam praktiknya, banyak institusi yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai mutu dalam kegiatan akademik dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan komitmen terhadap budaya mutu masih belum merata.¹⁰

⁹ Syafaruddin, Mesiono, and Muhammedi, "Penyusunan Rencana Strategis Dalam Pengembangan Budaya Mutu Pendidikan Di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021).

¹⁰ Ibid.

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan. Banyak perguruan tinggi, terutama di wilayah terpencil atau dengan dukungan finansial yang terbatas, kesulitan menyediakan tenaga ahli dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan budaya mutu. Kelemahan ini diperburuk oleh tata kelola institusi yang sering kali belum optimal, mengakibatkan lemahnya koordinasi dan komunikasi di antara berbagai unit di perguruan tinggi.¹¹

Keterlibatan *stakeholder* dalam membangun budaya mutu juga masih rendah. Proses penyusunan strategi mutu sering kali hanya melibatkan segelintir pihak, sehingga tidak menciptakan dukungan kolektif yang cukup untuk mewujudkan perubahan nyata. Padahal, pelibatan semua elemen, baik dosen, mahasiswa, maupun masyarakat, sangat penting untuk menciptakan budaya mutu yang kuat.¹²

Diperlukan adanya optimalisasi langkah-langkah penerapan SPMI dalam menghadapi tantangan tersebut, berikut langkah-langkah penerapan SPMI berdasarkan Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi yang dibuat oleh Direktorat Pembelajaran sebagai berikut:¹³

1. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi. Dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi bersama dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) atau Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Tim ini bertugas menyusun standar berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Pada tahap ini, pemangku kepentingan seperti dekan, kepala program studi, dan dosen sering dilibatkan untuk memberikan masukan.
2. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. Dilaksanakan oleh seluruh unit di perguruan tinggi, seperti fakultas, program studi, bagian administrasi, serta tenaga pendidik dan kependidikan. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari.
3. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur). Dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) atau tim evaluasi khusus yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Evaluasi ini mencakup pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Pihak yang bertanggung jawab, seperti UPM dan pimpinan unit, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terdeteksi selama evaluasi. Pada tahap ini, rekomendasi untuk perbaikan dan strategi pemeliharaan mutu juga disusun.
5. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan. Tugas ini berada pada pimpinan perguruan tinggi dan LPM/UPM, yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk meninjau ulang standar yang ada. Proses ini melibatkan diskusi dan kajian berdasarkan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas.



Gambar 1. Langkah-Langkah Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi

¹¹ Irfan Nulhaq et al., "Cendikia Pendidikan," *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2023): 50–54.

¹² Ibid.

¹³ *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik*, 2024.

Penyebab Terjadinya Disparitas dalam Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi

Disparitas dalam pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal, faktor internal berasal dari dalam institusi perguruan tinggi itu sendiri yang meliputi:
 - a. Rendahnya Komitmen dan Pemahaman terhadap Mutu.
Banyak institusi yang masih memandang pelaksanaan SPMI sebagai formalitas administrasi semata tanpa memahami tujuan strategisnya dalam peningkatan mutu pendidikan. Rendahnya pemahaman ini mengakibatkan kurangnya komitmen dari pimpinan dan staf dalam mendukung implementasi yang optimal.¹⁴
 - b. Kurangnya Budaya Mutu (*Quality Culture*).
Salah satu tantangan besar adalah kurangnya internalisasi budaya mutu di kalangan sivitas akademika. Tanpa budaya mutu yang kuat, penerapan SPMI cenderung terhambat karena tidak ada dorongan kolektif untuk meningkatkan standar mutu.¹⁵
 - c. Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi.
Perguruan tinggi dengan akses terbatas terhadap teknologi modern dan sistem informasi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu secara efektif. Teknologi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pengelolaan data dan pelaporan mutu.¹⁶
2. Faktor Eksternal, faktor eksternal berasal dari lingkungan luar institusi yang memengaruhi implementasi SPMI, meliputi:
 - a. Perbedaan Sumber Daya Institusi.
Perguruan tinggi di wilayah perkotaan atau yang berstatus negeri umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik, seperti infrastruktur, tenaga ahli, dan pendanaan, dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta atau yang berlokasi di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kemampuan institusi untuk mengimplementasikan SPMI sesuai standar yang ditetapkan.¹⁷ Perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas cenderung menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memengaruhi reputasi institusi, daya tarik bagi calon mahasiswa, dan daya saing lulusan di pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang mendukung distribusi sumber daya yang lebih merata, seperti pendanaan tambahan, pendampingan teknis, dan insentif bagi perguruan tinggi yang berlokasi di daerah terpencil.
 - b. Tidak Meratanya Dukungan Kebijakan.
Dukungan dari lembaga pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan LLDIKTI, terkadang belum merata, sehingga perguruan tinggi tertentu tidak mendapatkan pendampingan atau pelatihan yang cukup untuk memahami dan menerapkan SPMI.¹⁸

¹⁴ Siti Makhmudah et al., "Implementation of Internal Quality Assurance System as an Effort to Improve The Quality of Higher Educational Research in West Java," *Tec Empresarial* 19, no. 1 (2024): 2315–2328.

¹⁵ Muh. Fitrah, . Ruslan, and . Hendra, "Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi," *Jurnal Penjaminan Mutu* 4, no. 1 (2018): 76.

¹⁶ Opan Arifudin, "Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research," *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 1, no. 3 (2022): 297–306.

¹⁷ Saepudin, "Problematika Dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia."

¹⁸ Makhmudah et al., "Implementation of Internal Quality Assurance System as an Effort to Improve The Quality of Higher Educational Research in West Java."

Disparitas dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Ketimpangan ini menciptakan perbedaan besar dalam mutu lulusan, pencapaian akreditasi, dan kemampuan institusi untuk bersaing di tingkat internasional. Perguruan tinggi yang tidak mampu menerapkan SPMI secara optimal sering kali menghadapi penurunan kompetensi lulusan.¹⁹ Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan standar yang konsisten dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pembelajaran, sehingga lulusan mereka kurang kompetitif di pasar kerja nasional maupun internasional. Kurikulum pembelajaran juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pada lembaga pendidikan, hal tersebut dapat ditinjau dari pelaksanaan SPMI pada lembaga pendidikan tertentu.²⁰

Disparitas ini juga memengaruhi hasil akreditasi institusi, di mana perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas sering kali mendapatkan akreditasi yang lebih rendah.²¹ Akreditasi yang rendah dapat menghambat institusi tersebut dalam menarik mahasiswa potensial, mengakses pendanaan untuk penelitian, atau menjalin kerja sama strategis dengan pihak lain.²² Di tingkat global, ketimpangan ini berdampak pada rendahnya peringkat beberapa perguruan tinggi Indonesia dalam pemeringkatan dunia, karena banyak institusi yang tidak mampu memenuhi standar mutu internasional.

Dampak lainnya terlihat pada pengembangan riset dan inovasi. Perguruan tinggi yang kekurangan sumber daya cenderung menghadapi kesulitan dalam menghasilkan penelitian berkualitas tinggi, sehingga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah sosial dan ekonomi menjadi sangat terbatas.²³ Disparitas ini juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti rendahnya partisipasi masyarakat di daerah tertinggal dalam pendidikan tinggi, yang pada akhirnya memperburuk kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Langkah-langkah Strategis yang Dapat Diambil untuk Mengoptimalkan SPMI di Perguruan Tinggi

Pada dasarnya terdapat beberapa hal yang dapat mendistraksi keoptimalan penerapan SPMI di perguruan tinggi keterbatasan dalam pengukuran kualitas pendidikan yang terlalu berfokus pada aspek akademik, sehingga mengabaikan indikator non-akademik seperti pengembangan karakter dan keterampilan sosial.²⁴ Perguruan tinggi dengan pendekatan holistik terhadap mutu cenderung lebih unggul dibandingkan institusi yang mengadopsi pendekatan terbatas, sehingga menciptakan kesenjangan kualitas. Selain itu, kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan juga memperparah disparitas ini.²⁵ Institusi dengan kapasitas struktural yang kuat mampu mengadaptasi kebijakan dengan lebih baik, sedangkan perguruan tinggi di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas sering kali kesulitan untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Di samping itu, tuntutan yang beragam dari stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa, sering kali membebani institusi yang tidak memiliki mekanisme jelas untuk menyeimbangkan kebutuhan tersebut.²⁶ Akibatnya, perguruan tinggi yang kurang mampu memenuhi tuntutan ini tertinggal dalam pelaksanaan SPMI yang efektif.

¹⁹ Saepudin, "Problematisasi Dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia."

²⁰ Febriana Kurnia Dewi, Nur Kholis, and Enni Subchandini, "Implementasi Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester Sebagai Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya," *TADBIR MUWAHHID* 7, no. 1 (April 30, 2023): 133–150.

²¹ Tarigan and Zahara, "Internal Quality Assurance System in Achieving Accreditation Scores for Islamic Religious Higher Education."

²² Afridoni et al., "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan."

²³ Widyo, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta."

²⁴ Giovani Irfan Ribisi, Ela Sukarya, and Hidayat Nandang, "Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Melalui Pendekatan Balanced Scorecard," *Jurnal Manajemen Bisnis Modern* 6, no. 3 (2024): 38–53.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Untuk meminimalisir hambatan dalam penerapan SPMI tersebut, diperlukan adanya langkah-langkah strategis yang tepat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Institusi.

Perguruan tinggi perlu memperkuat sumber daya melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan pencarian dana tambahan, seperti hibah penelitian atau program kemitraan dengan pihak swasta. Studi oleh Arifudin²⁷ menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia yang menerima hibah peningkatan kapasitas dari pemerintah mengalami peningkatan dalam infrastruktur dan kualitas tenaga pengajar, yang berdampak pada perbaikan skor akreditasi institusi. Pemerintah juga dapat membantu dengan menyediakan pendanaan khusus bagi perguruan tinggi di daerah terpencil untuk meningkatkan akses terhadap teknologi dan pelatihan tenaga pendidik.²⁸

2. Membangun Komitmen dan Pemahaman terhadap Mutu.

Studi menunjukkan bahwa perguruan tinggi dengan budaya mutu yang kuat memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam akreditasi dan daya saing lulusannya Universitas Gadjah Mada, misalnya, menerapkan pelatihan berkelanjutan bagi dosen dan staf administrasi untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya SPMI.²⁹ Workshop rutin dan audit internal yang terjadwal membantu memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami dan menerapkan standar mutu dengan konsisten.³⁰

3. Penguatan Teknologi dan Sistem Informasi.

Integrasi teknologi informasi dalam sistem penjaminan mutu dapat meningkatkan efisiensi evaluasi dan pelaporan. Studi menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang mengadopsi sistem manajemen mutu berbasis digital mengalami peningkatan akurasi data dan efektivitas pemantauan mutu³. Universitas Islam Nusantara, misalnya, mengembangkan sistem e-Akreditasi yang memungkinkan pengelolaan dokumen mutu secara lebih terstruktur dan transparan.³¹

4. Peningkatan Dukungan Kebijakan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dapat memperkuat pendampingan teknis bagi perguruan tinggi, khususnya yang berada di daerah, melalui program seperti bimbingan teknis dan supervisi implementasi SPMI. Studi menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang mendapatkan pendampingan dari LLDIKTI memiliki tingkat kesiapan akreditasi yang lebih baik dibandingkan institusi yang tidak mendapatkan bimbingan teknis.³² Contohnya, perguruan tinggi di Sumatera yang menerima program asistensi kebijakan SPMI mengalami peningkatan skor akreditasi dalam kurun waktu lima tahun.

5. Pengembangan Budaya Mutu.

Untuk mengatasi kurangnya budaya mutu, perguruan tinggi perlu mengintegrasikan nilai-nilai mutu dalam seluruh aktivitas akademik dan administratif. Studi menunjukkan bahwa perguruan tinggi dengan budaya mutu yang kuat memiliki sistem monitoring mutu yang berkelanjutan serta

²⁷ Arifudin, "Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research."

²⁸ Dewi Agustriani, "Evaluasi Strategi Dalam Manajemen Pengendalian Mutu Pembelajaran Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri," *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)* 4, no. 1 (2023): 1–23.

²⁹ Sulaiman and Wibowo, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada."

³⁰ Elbadiansyah and Masyni, "Evaluation Model of Internal Quality Assurance System in Universities," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (2022): 1157–1172.

³¹ Ibid.

³² Saepudin, "Problematika Dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia."

memberikan penghargaan kepada unit akademik yang berhasil mempertahankan standar mutu tinggi.³³ Kepemimpinan transformasional juga berperan penting dalam membangun budaya mutu yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.³⁴

6. Penerapan Pendekatan Holistik dalam Evaluasi.

Penggunaan pendekatan seperti *Balanced Scorecard* dapat membantu perguruan tinggi dalam mengevaluasi mutu secara komprehensif dari berbagai dimensi, termasuk keuangan, proses internal, pembelajaran, dan keterlibatan stakeholder. Studi menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang menerapkan pendekatan *Balanced Scorecard* mengalami peningkatan dalam pencapaian indikator mutu akademik dan administrasi. Misalnya, Politeknik Negeri Bandung menggunakan *Balanced Scorecard* untuk mengevaluasi efektivitas program akademik dan strategi bisnisnya dalam menghadapi persaingan global.³⁵

Melalui penerapan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perguruan tinggi dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan SPMI dan mengurangi disparitas kualitas pendidikan tinggi, sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih merata dan kompetitif secara global. Jika diperlukan, langkah-langkah ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap institusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Namun, pelaksanaan SPMI masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman dan komitmen terhadap mutu, kurangnya teknologi pendukung, disparitas kebijakan, dan budaya mutu yang belum merata. Tantangan-tantangan ini berkontribusi terhadap adanya kesenjangan kualitas pendidikan tinggi, yang berdampak pada mutu lulusan, akreditasi institusi, dan daya saing di tingkat internasional.

Untuk mengatasi disparitas dalam pelaksanaan SPMI, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada pemerataan akses dan dukungan bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya. Peningkatan sumber daya institusi dapat dilakukan melalui pendanaan tambahan dan kemitraan industri untuk mendukung infrastruktur dan tenaga pengajar. Penguatan teknologi informasi memungkinkan semua perguruan tinggi, termasuk di daerah terpencil, mengakses sistem penjaminan mutu berbasis digital.

Selain itu, peningkatan dukungan kebijakan harus memastikan bimbingan teknis dan insentif bagi institusi yang menerapkan SPMI secara optimal. Pembangunan budaya mutu dapat diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan bagi pimpinan dan sivitas akademika. Pendekatan *Balanced Scorecard* juga membantu menyesuaikan strategi implementasi SPMI sesuai dengan kondisi masing-masing institusi. Dengan strategi ini, perguruan tinggi dapat mengurangi kesenjangan mutu dan membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih merata dan kompetitif.

³³ Tarigan and Zahara, "Internal Quality Assurance System in Achieving Accreditation Scores for Islamic Religious Higher Education."

³⁴ Rahman Tanjung et al., "Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 6, no. 1 (2022): 29.

³⁵ Ribisi, Sukarya, and Nandang, "Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Melalui Pendekatan *Balanced Scorecard*."

REFERENCES

- Afridoni, Suntama Putra, Salfen Hasri, and Sohiron. "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13832–13838.
- Agustriani, Dewi. "Evaluasi Strategi Dalam Manajemen Pengendalian Mutu Pembelajaran Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri." *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)* 4, no. 1 (2023): 1–23.
- Arifudin, Opan. "Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research." *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 1, no. 3 (2022): 297–306.
- Dewi, Febriana Kurnia, Nur Kholis, and Enni Subchandini. "Implementasi Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester Sebagai Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya." *TADBIR MUWAHHID* 7, no. 1 (April 30, 2023): 133–150.
- Elbadiansyah, and Masyni. "Evaluation Model of Internal Quality Assurance System in Universities." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (2022): 1157–1172.
- Febriana, Kurnia Dewi. "Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 21001:2018 Dalam Menunjang Pelaksanaan Cambridge International Primary Program (CIPP) Di SD Muhammadiyah 4 Surabaya." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. Accessed May 15, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/54431/>.
- Fitrah, Muh., . Ruslan, and . Hendra. "Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi." *Jurnal Penjaminan Mutu* 4, no. 1 (2018): 76.
- Harahap, Muhammad Syahril, Syawal Gultom, . Darwin, . Rosnelli, and Nur Hidayat Fithriyah. "Kajian Implementasi Spmi (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah Dan Perguruan Tinggi Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2023): 447–480.
- Makhmudah, Siti, Endang Komara, Teti Ratnawulan, and Universitas Islam Nusantara. "Implementation of Internal Quality Assurance System as an Effort to Improve The Quality of Higher Educational Research in West Java." *Tec Empresarial* 19, no. 1 (2024): 2315–2328.
- Nulhaq, Irfan, Dede Ulfah Munirah Aziz, Gugun Taufik, Risa Umami, and Neneng Nurmalasari. "Cendikia Pendidikan." *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2023): 50–54.
- Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik*, 2024.
- Ribisi, Giovani Irfan, Ela Sukarya, and Hidayat Nandang. "Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Melalui Pendekatan Balanced Scorea." *Jurnal Manajemen Bisnis Modern* 6, no. 3 (2024): 38–53.
- Saepudin, Asep. "Problematika Dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia." *Jurnal Teknodik* (2004): 068–086.
- Sulaiman, Ahmad, and Udik Budi Wibowo. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 17.
- Syafaruddin, Mesiono, and Muhammedi. "Penyusunan Rencana Strategis Dalam Pengembangan Budaya Mutu Pendidikan Di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021).

Tanjung, Rahman, Yuli Supriani, Annisa Mayasari, and Opan Arifudin. "Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 6, no. 1 (2022): 29.

Tarigan, Tetty Marlina, and Fatimah Zahara. "Internal Quality Assurance System in Achieving Accreditation Scores for Islamic Religious Higher Education." *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 8, no. 2 (2024): 677.

Widyo, Winarso. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta." *Dimensi* 10, no. November (2021): 665–673.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms%0AIMPLEMENTASI>.

